

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Keaslian Penelitian	8
1.3. Rumusan Masalah	13
1.4. Pertanyaan penelitian	14
1.5. Tujuan Penelitian.....	14
1.6. Manfaat Penelitian.....	15
1.7. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Kerangka Teori.....	17
2.1.1. Kebijakan Publik dan Proses Kebijakan.....	18
2.1.2. Formulasi Kebijakan.....	21
2.1.3. Pendekatan Multiple-Streams Framework.....	25
2.1.4. Analisis Pemangku Kepentingan.....	35
2.2. Kerangka Berpikir Penelitian	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Data yang Digunakan	42
3.3. Metode Pengumpulan Data	42
3.4. Metode Analisis Data	46
3.5. Batasan Penelitian	48
BAB IV DINAMIKA UKK IMIGRASI UGM DAN AKTOR KEBIJAKANNYA	49
4.1. Pembentukan UKK Imigrasi sebagai Proses Kebijakan	49

4.2.	Kedudukan UKK Imigrasi dan Mekanisme Pengajuannya.....	53
4.3.	Dinamika Kebijakan Pembentukan UKK Imigrasi UGM.....	54
4.3.1.	Latar Belakang Pembentukan	55
4.3.2.	Mengembangkan Ide Menjadi Konsep Kebijakan.....	57
4.3.3.	Kesepakatan yang Terlaksana Menjadi Kebijakan	62
4.4.	Profil Singkat UKK Imigrasi UGM	63
4.5.	Aktor yang Terlibat	64
BAB V ANALISIS DINAMIKA FORMULASI KEBIJAKAN UKK IMIGRASI UGM		69
5.1.	Aliran masalah.....	70
5.1.1.	<i>Focusing Event</i> : Internasionalisasi Pendidikan Tinggi dan Reformasi Birokrasi	74
5.1.2.	Kehadiran Birokrat Sebagai <i>Problem Broker</i>	77
5.1.3.	Penetapan Perhatian pada Masalah yang Sama	81
5.2.	Aliran kebijakan	83
5.2.1.	Alternatif Kebijakan Hanya Sedikit.....	84
5.2.2.	Tantangan Regulasi.....	87
5.2.3.	Penentuan kelayakan.....	90
5.3.	Aliran politik	94
5.3.1.	Pergantian Kepemimpinan.....	95
5.3.2.	Dukungan Pemerintah Pusat dan Para Tokoh Pejabat Publik	97
5.3.3.	Suasana Nasional	98
5.4.	Jendela kebijakan dan Penyatuan Aliran	102
5.4.1.	Jendela awal : Masalah yang Tersampaikan.....	102
5.4.2.	Jendela Kebijakan Melalui Kepemimpinan yang Peduli dengan Isu Pendidikan	105
5.4.3.	Kesesuaian dengan Agenda Lainnya dan Terjadinya Dua Jendela Kebijakan.....	107
5.5.	Wirausahawan kebijakan.....	110
5.5.1.	Wirausahawan Kebijakan dalam Mengeskalasi Masalah	111
5.5.2.	Wirausahawan Kebijakan dalam Menerjemahkan Masalah Menjadi Konsep Kebijakan	111
5.5.3.	Wirausahawan Kebijakan dalam Melanjutkan Kebijakan Hingga Diimplementasikan.....	113

5.6.	Analisis Aktor.....	117
5.7.	Pemetaan Pemangku Kepentingan Kebijakan UKK Imigrasi UGM ...	121
5.8.	Kebermanfaatan UKK Imigrasi UGM Sebagai Salah Satu Penunjang Internasionalisasi Pendidikan Tinggi di UGM	127
BAB VI PENUTUP		130
6.1.	Kesimpulan.....	130
6.2.	Rekomendasi	134
DAFTAR PUSTAKA		136
LAMPIRAN.....		142
	Lampiran Pedoman Wawancara.....	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Informan Wawancara.....	44
Tabel 2 Pedoman Pengumpulan Data	45
Tabel 3 Jumlah WNA pemegang izin tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta ...	56
Tabel 4 Jumlah Orang Asing Hasil Pendataan dan Pengawasan pada Universitas/Perguruan Tinggi Tahun 2018	61
Tabel 5 Analisis pada Aliran Masalah	82
Tabel 6 Analisis Aliran Politik Pembentukan UKK Imigrasi UGM	100
Tabel 7 Analisis Strategi yang Dilakukan Oleh Wirausahawan Kebijakan.....	114
Tabel 8 Peran Aktor Kebijakan dalam Proses Kebijakan	118
Tabel 9 Analisis Pemangku Kepentingan berdasarkan Kepentingan dan Kewenangan.....	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perbandingan Capaian Hasil PNBPN Pelayanan Keimigrasian	2
Gambar 2 Matriks Power-Interest untuk Analisis Pemangku Kepentingan	36
Gambar 3 Kerangka Berpikir Penelitian	40
Gambar 4 Analisis Data dengan Kerangka Spiral.....	46
Gambar 5 Pemetaan Pemangku Kepentingan dalam Diagram Power-Interest Berskala.....	122
Gambar 6 Pemetaan Pemangku Kepentingan Kebijakan UKK Imigrasi UGM .	125

DAFTAR SINGKATAN

Daring	: Dalam jaringan
Dirjen	: Direktur Jenderal
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
Kakanwil	: Kepala Kantor Wilayah
Kanim	: Kantor Imigrasi
Kanwil	: Kantor Wilayah
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepmen	: Keputusan Menteri
KUI	: Kantor Urusan Internasional
Menkumham	: Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
MSF	: Multiple Streams Framework
Pemda	: Pemerintah Daerah
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Poltekim	: Politeknik Keimigrasian
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
TPI	: Tempat Pemeriksaan Imigrasi
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UKK	: Unit Kerja Kantor
ULP	: Unit Layanan Paspor
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
WBBM	: Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
WBK	: Wilayah Bebas dari Korupsi
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia